

EKUITAS
Akreditasi No.55a/DIKTI/Kep/2006

ISSN 1411-0393

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DI KOTA SURABAYA

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

In monetary autonomy, Surabaya government expects to increase its province earnings. As the government regulation number 22 in 1999 (the newest is number 32 in 2004), Surabaya government has a privilege autonomy in considering the intensification and extensification to support its province earnings for economical development. This research intends to get a real proof on implementation of intensification and extensification for province and also to get the real proof on regional economic development and the growing of earning grade after the application of newest regulation number 32 in 2004.

This is a qualitative research by taking data from BPS office in Surabaya, on 10 June 2005 and from Surabaya financial department. And the results show that the new regulation can increase the province earnings by implementing intensification (tax of bill and retribution) of an area which is stated. And after the rule was issued can increase the amount of infestations. So these support the growing economic grade and infestation season around east Java regions especially in Surabaya city.

Key words: efficiency and affectivity, regional autonomy, intensification, extensification.

PENDAHULUAN

Kemandirian daerah di bidang keuangan salah satunya bersumber dari PAD yang mampu dihimpun oleh daerah yang bersangkutan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Dengan adanya tuntutan otonomi yang makin luas dan kondisi keuangan negara yang menurun mendorong daerah untuk semakin meningkatkan penerimaannya yang bersumber dari PAD dan juga yang bersumber dari Dana Perimbangan. Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu daerah Tingkat II di Jatim merupakan Ibukota Propinsi dan daerah yang terpadat penduduknya dan terbesar konsentrasi kegiatan ekonominya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan, Pemkot Surabaya di harapkan mampu

secara mandiri meningkatkan peran PADnya di samping penerimaan lain dalam rangka membiayai pembangunan ekonominya.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, maka penggalan dana secara optimal dari PAD Kota Surabaya sudah merupakan hal yang tidak dapat di tawar lagi. Usaha untuk meningkatkan PAD Kota Surabaya adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. **Ekstensifikasi** adalah dengan meluaskan jaringan obyek Pendapatan Asli Daerah, sedangkan **intensifikasi** adalah dengan mengoptimalkan penerimaan dari obyek Pendapatan Asli Daerah yang telah ada (dalam Bonaventura, Ngw 2004: 281-244)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti berhubungan dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerimaan PAD setelah di berlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang sekarang telah di revisi UU No 32 Tahun 2004 ?
2. Apakah kebijaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah setelah di berlakukannya UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004 tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan pertumbuhan tingkat investasi ?

TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh implementasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dalam pelaksanaan Otonomi Daerah setelah di terapkannya UU No.22 Th. 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004.
2. Untuk memperoleh bukti empiris ada atau tidaknya perubahan pertumbuhan perekonomian regional dan pertumbuhan tingkat investasi setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004 tersebut.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemkot Surabaya.
2. Memberikan bukti empiris ada atau tidaknya perubahan pertumbuhan perekonomian regional dan pertumbuhan tingkat investasi setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004.

Sasaran

1. Hasil penelitian ini dapat di gunakan bagi regulator Pemkot Surabaya sebagai salah satu pertimbangan untuk meningkatkan PAD.
2. Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk membuktikan bahwa implementasi UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004 mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi regional sehingga dapat memberikan petunjuk bagi regulator tentang perlunya kemampuan aparat pelaksanaan pemerintah kota dalam mengimplementasikan peraturan, ketentuan dan kebijaksanaannya.

LANDASAN TEORI

Sumber Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Bab IV Pasal 5, penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Bagian Laba Usaha yang sah;
 4. Lain-lain Pendapatan;
- b. Dana Perimbangan yang terdiri atas
 1. Dana Bagi Hasil;
 2. Dana Alokasi Umum dan dana alokasi khusus
- c. Pembiayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari:
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 2. Penerimaan pinjaman daerah;
 3. Dana cadangan daerah; dan
 4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan sumber penerimaan daerah. Komponen sumber penerimaan daerah tersebut secara penuh dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Hal ini semakin leluasa dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota setelah diberlakukannya Otonomi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pendapatan yang benar-benar diperoleh dan di pergunakan oleh daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar penerimaan PAD, berarti pula bahwa kemampuan dalam melaksanakan pembangunan akan lebih baik dan semakin tinggi kontribusi PAD serta dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap total penerimaan daerah, maka bisa dikatakan daerah itu semakin mandiri. PAD inilah yang seharusnya menjadi tolok ukur kemampuan masing-masing propinsi/kota dalam mengatur rumah tangganya sendiri yaitu jumlah dana yang benar-benar menunjukkan kemampuan setiap daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah (UU N0.32 Tahun 2004).

Investasi

Dengan diserahkannya kewenangan bidang penanaman modal ke daerah, sebenarnya merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal. Semakin banyak investasi yang di tanamkan, maka semakin besarlah nilai produksi regional yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambaran mengenai keuangan daerah tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran baik ditingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi antara lain (Ichsan dkk, 1997:27)

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan;
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi daerah;
3. Memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah pada umumnya dan kepada daerah khususnya karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah;
4. Merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

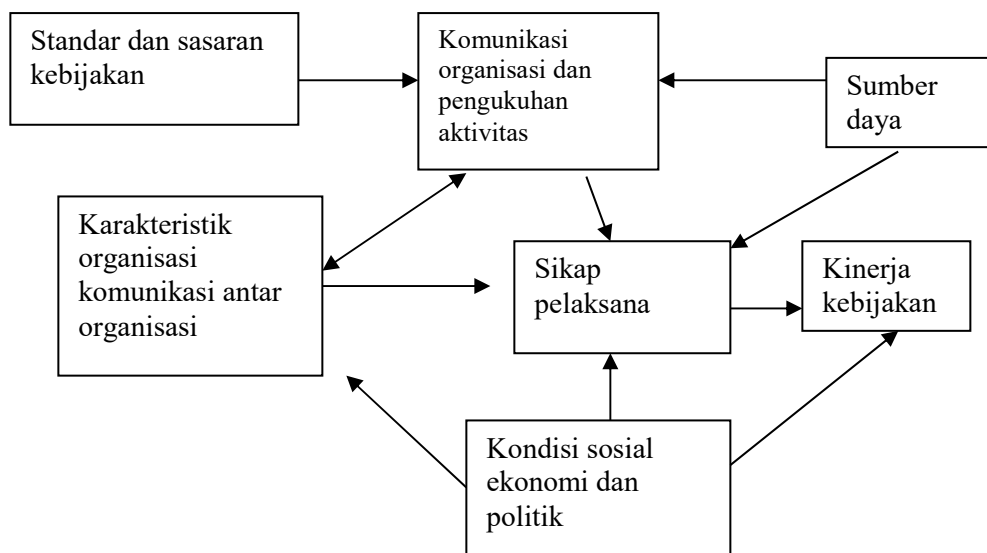
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran dari tingkat pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional dibidang ekonomi. Data PDRB juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Sedangkan manfaat dari penyusunan PDRB adalah:

- a. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya; dan

- b. Sebagai bahan perencanaan bidang/aspek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang baik bagi pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas (Dokumen Biro Pusat Statistik Kota Surabaya, 2003)

Teori dan Model Implementasi

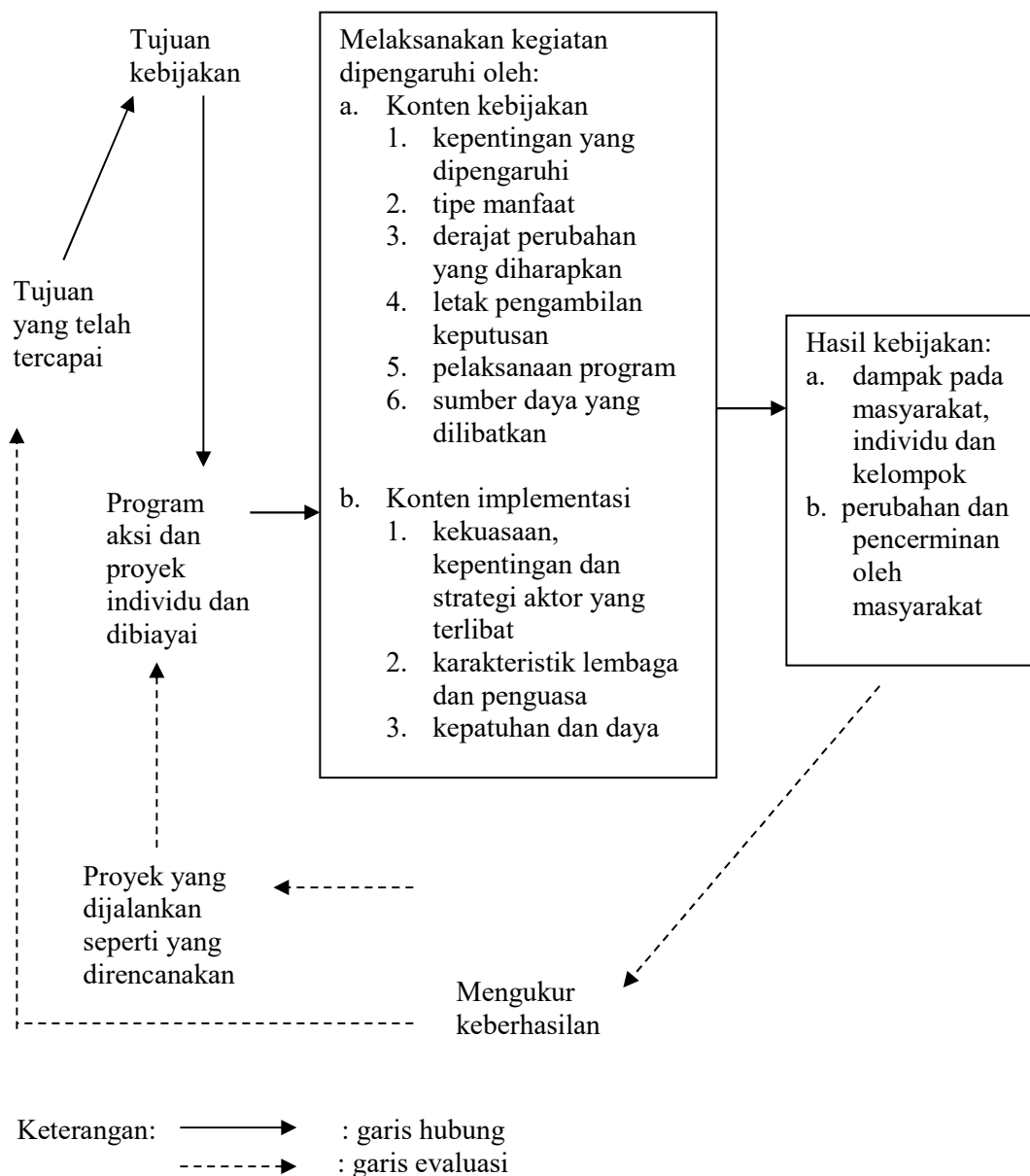
Model Van Meter dan Van Horn (dalam Idris HP 2003:38) merumuskan sebuah abstraksi yang memperhatikan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai faktor sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini: Untuk mengamati model implementasi kebijakan menurut Wibawa (1994:94) dikemukakan ada 3 (tiga) model implementasi kebijakan yaitu: 1) Model Van Meter dan Van Horn, 2) Model Grindle, 3) Model Masmanian dan Sabatier, yang ditunjukkan dalam gambar 1, 2 dan 3.



Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn

Sumber: Wibawa, 1994: 19

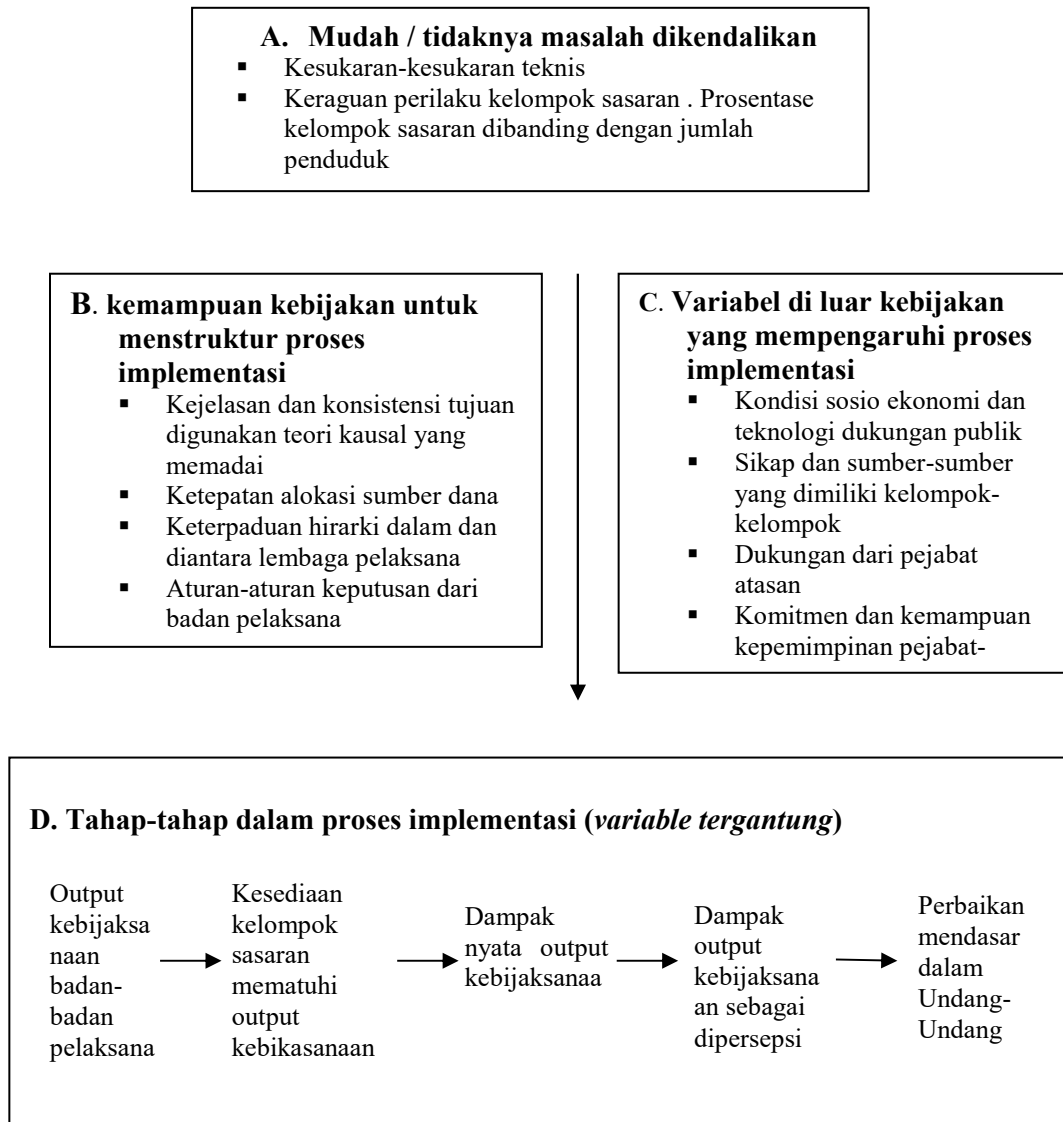
Sedangkan model implementasi Kebijakan menurut Grindle bisa dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Sumber: Wibawa Samudra, 1994: 23

Adapun model dari *Mazmanian dan Sabatier* tertera dalam skema berikut:



Gambar 3
Variabel proses implementasi kebijakan

Sumber: model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (dalam Idris HP 2003:39)

Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Dalam kaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah maka kebijakan yang perlu ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan lebih berperan. Kebijakan dan usaha **Intensifikasi** adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini sedangkan kebijakan dan usaha **Ekstensifikasi** dalam pemungutan ini adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.

Lains (1985:57) memberikan pendapat bahwa pendapatan pajak daerah akan dapat pula ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak serta perbaikan kontrol berbagai petugas pemungutan dalam rangka mengurangi kebocoran. PAD dapat pula ditingkatkan dengan meningkatkan peran perusahaan daerah melalui peningkatan laba usaha.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, karena penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di kota Surabaya. Penelitian ini bersifat terbuka, artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan didepan bersifat fleksibel sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan sehingga fokus penelitiannyapun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah Bogdan & Biklen 1992, Maleong 1990, Nasution 1988, Strauss & Corbin 1990 (dalam Idris Hp 2003:54)

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yang lebih berupaya memahami situasi tertentu yaitu meneliti tentang sumber-sumber penerimaan apa saja yang dapat dimasukkan dalam penerimaan PAD serta bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkannya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kota Surabaya dengan mengambil situs di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Pertimbangan pemilihan lokasi ini antara lain adalah:

1. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka keuangan daerah merupakan faktor yang paling penting;

2. Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu dinas penghasil yang ada di Kota Surabaya, yang memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

Penentuan Informan

Berkenaan dengan tujuan penelitian kualitatif di atas, maka untuk memilih informan kunci, dilakukan berdasarkan kriteria *Spradley*, sebagaimana dinyatakan oleh sanggar Kanto (Bungin, 2003:54-55).

Pada penelitian ini Informan awal dipilih/ditentukan melalui cara *purposive sampling*. Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memilih data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan awal adalah Kepala Dispenda Kota Surabaya kemudian akan diteruskan Kepala Bagian dan Staf yang ada di kantor Dipenda Kota Surabaya dan juga pada Ka.Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Surabaya.

Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data (*Logging the data*) meliputi sbb:

- 1) Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung atau tidak langsung maupun secara formal atau tidak formal terhadap obyek penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi data sekunder yang diperoleh dari Kantor Dispenda dan Kantor Statistik Kota Surabaya serta instansi terkait.
- 2) Wawancara mendalam (*Indepth Interview*):
Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, dan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi ini telah mampu mengorek kejujuran dan keobyektifan informan untuk memberikan apa yang sebenarnya.
- 3) Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, bahan-bahan laporan serta kebijakan yang di ambil pemerintah daerah Kota Surabaya.

Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ini memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya, dalam penelitian kualitatif standart tersebut disebut keabsahan data. Menurut *Lincoln* dan *Guba* (1985:300) dan *Moleong* (1990:179) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu:

1) *Derajat Kepercayaan (credibility)*

Pada dasarnya penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep *validitas internal* dari *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan inkuiri sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2) *Keteralihan (trasferbility)*

Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya.

3) *Kebergantungan (dependability)*

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas (*reability*). Reabilitas merupakan syarat bagi validitas. Hanya dengan alat yang reliabel akan dapat diperoleh data yang valid. Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Dengan kata lain bergantung pada keadaan peneliti. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan *audit trail/memeriksa dan melacak suatu kebenaran* (Moleong, 1990), yaitu usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan.

4) *Kepastian (confirmability)*

Untuk memenuhi kriteria kepastian digunakan teknik pemeriksaan dengan menyatukan kepastian dengan ketergantungan.

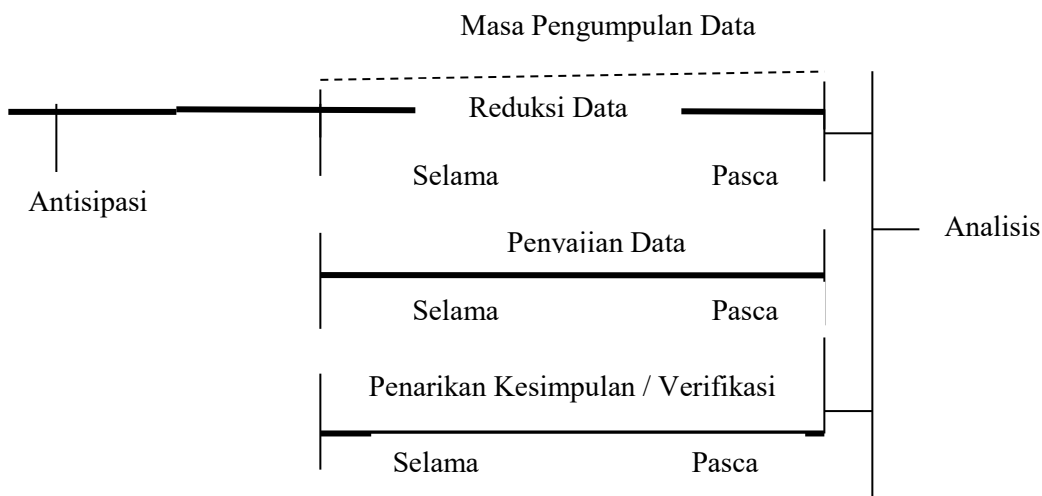
Analisis Data

Karena penelitian ini mempergunakan data yang *bersifat kualitatif* maka data akan diolah dengan analisis kualitatif dengan berpedoman pada langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:19) dengan model alir yaitu: reduksi data/pengolahan data, penyajian data, menggabungkan informasi, menarik kesimpulan/verifikasi. Gambar mengenai analisis Miles dan Huberman dalam bentuk diagram ditunjukkan Gambar 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. a) **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Setelah Diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 revisi UU Tahun 2004.**

Sekarang ini kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD. Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 Th.2004 sampai tahun kedua pelaksanaan otonomi, Kota Surabaya mengalami peningkatan PAD yang cukup besar. Sumbangan peningkatan PAD yang terbesar terutama berasal dari pajak dan retribusi daerah serta dari dana perimbangan.



Gambar 4
Analisis Menurut Miles dan Huberman atau Diagram Alir (flow Chart)

Sumber: Miles Husberman, Analisis Data Kualitatif 1992:18

Untuk melihat perbandingan APBD sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004 Pemkot Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Surabaya
Th Anggaran 1996-1999 (dalam ribu Rupiah)

No	Uraian	1996	1997	1998	1999
1	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran thn lalu	7.207.112	6.176.594	4.905.474	10.223.373
2	PAD	116.972.597	142.238.941	122.055.376	138.684.846
3	Bag. Hasil Pajak/ bukan pajak	46.428.540	46.511.815	72.035.229	84.857.145
4	Sumbangan & bantuan	45.941.458	46.293.199	92.780.640	125.530.129
5	Pinjaman pemkot	19.359.217	22.716.922	41.105.573	24.431.411
6	Urusan kas dan perhitungan	118.632.862	110.739.155	100.056.411	47.249.569
Total		356.632.862	374.676.626	432.938.703	430.976.473

Sumber: Buku APBD pemerintah Kota Surabaya, Tahun anggaran 1996,1997,1998, 1999

Tabel 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Surabaya
Tahun Anggaran 2001-2004 (dalam ribu Rupiah)

Kode Anggaran	Uraian	2001	2002	2003	2004
	<u>Rekapitulasi</u>				
1.1	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran th lalu Restribusi daerah	39.531.745	172.476.487	176.466.548	-
1.2.	Bag. PAD	207.993.326	277.863.171	348.310.013	417.377.014
1.3.	(Bag.Dana Perimbangan)	510.324.424	541.621.330	613.894.948	877.432.590
1.4.	Bag. Pinj daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Bag.Lain-lain penerimaan yang sah	46.159.741	100.781.314	188.771.134	35.541.138
	Total	804.009.238	1.092.742.303	1.327.442.644	1.330.350.743

Sumber: Buku APBD Pemerintah Kota Surabaya, Th. Anggaran 2001,2002,2003 & 2004

Dari data tabel 1 diketahui bahwa jumlah total APBD sebelum diberlakukannya UU no.22 Tahun 1999 revisi UU N0.22 Tahun 2004 peningkatannya tidak seberapa besar, bahkan pada tahun 1999 terjadi penurunan yaitu Rp 432.938.703 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp 430.976.473 milyar pada tahun 1999, penurunan ini disebabkan karena menurunnya jumlah urusan kas dan perhitungannya.

Tetapi sejak di berlakukannya UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 tahun 2004 terjadi peningkatan terhadap jumlah penerimaan yang cukup tajam, baik yang berasal dari Bagian Pendapatan Asli Daerah maupun dari Bagian Dana Perimbangan. Peningkatan jumlah total APBD tersebut dari Rp 804.009.238 milyar pada tahun 2001 meningkat tajam menjadi Rp 1.092.742.303 trilyun pada tahun 2002. Peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2002 tersebut disebabkan oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk keluar dari krisis ekonomi dengan jalan terus meningkatkan PAD, sehingga pada tahun 2003 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 1.327.442.644 trilyun dan pada tahun 2004 meningkat lagi sebesar Rp 1.330.350.743 trilyun.

b) Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya Bapak Haryono,SE menunjukkan bahwa: “optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang”. (Wawancara Tgl.14 Juli 2005).

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

c) Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Salah satu upaya untuk mendorong penerimaan PAD yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan dengan cara meningkatkan kinerja aparatur pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pemungutan secara proporsional dan professional. Upaya peningkatan pajak daerah melalui *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* memerlukan data yang akurat dan dukungan prasarana dan prasarana, SDA yang memadai juga sistem serta penyiapan penanganan pajak yang handal dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya Bapak Haryono,SE menunjukkan bahwa: “dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan PAD nampaknya intensifikasi PAD lebih mudah untuk diformulasikan di banding membuat kebijakan penambahan obyek baru dari PAD yang memerlukan banyak waktu dalam proses formulasi sampai pada pengesahannya yang melibatkan pemerintahan pusat”. (wawancara, 13 Juli 2005)

Setelah pelaksanaan otonomi, sejumlah daerah sudah menempuh upaya-upaya ini, bahkan beberapa langkah ada yang cukup kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber peningkatan pendapatan daerah diantaranya adalah melalui:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Sumber Pendapatan lain

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasie Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya, Bapak Haryono, SE bahwa: “masih kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi karena biasanya setelah peraturan Daerah disahkan langsung dilaksanakan sehingga seringkali terjadi penghindaran/penolakan oleh masyarakat sebagai akibat ketidaktahuan tentang isi kebijakan tersebut”. (wawancara, Tgl. 14 Juli 2005)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Pelaporan Ibu Kasminiatur, SE, MM bahwa: “Pemerintah Kota Surabaya telah memformulasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan peningkatan PAD baik dalam bentuk kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi berupa serangkaian peraturan daerah”. (Wawancara, 13 Juli 2005) seperti yang tercantum pada tabel 3.

Tabel 3
Himpunan Peraturan Daerah Pemkot Surabaya

No	Dasar Hukum	Tentang
1.	Perda No.09 Tahun 2003	Pajak Hotel
2.	Perda No. 02 Tahun 2003	Pajak Restoran
3.	Perda No. 08 Tahun 2003	Pajak penerangan jalan
4.	Perda No. 09 Tahun 2002	Pajak hiburan
5.	Perda No. 12 Tahun 2001	Pajak parkir

Sumber: Buku himpunan Perda Pemkot Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dispenda Kota Surabaya Bapak Cip, beliau mengatakan bahwa: “Secara pokok sumber-sumber penerimaan PAD di Kota Surabaya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan. Penentuan target pemungutan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh dinas-dinas atau unit pengelolanya berdasarkan potensi dan pengalaman perkiraan penerimaan tahun sebelumnya”. (Wawancara tanggal 14 Juli 2005)

Untuk melihat jumlah kenaikan PAD dan Proporsinya sebelum dan sesudah diberlakukan UU No.22 Tahun 1999 revisi UU No.32 Tahun 2004 dapat dilihat pada tabel Proporsi PAD Kota Surabaya sbb:

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemkot Surabaya Th 1996-1999
(Dalam Ribu Rupiah)

No	Uraian	1996	1997	1998	1999
1.	Pajak daerah	51.458.179	62.468.029	69.813.949	77.136.860
2.	Restribusi daerah	57.441.393	69.285.634	43.614.788	46.397.581
3	Bag. Laba usaha daerah	4.060.238	4.694.547	2.472.392	7.921.410
4.	Penerimaan Dinas	2.460.111	2.593.851	2.307.730	0,00
5.	Lain-lain pendapatan	3.552.676	3.196.880	3.846.517	7.228.995
Jumlah		118.972.597	142.238.941	122.055.376	138.648.846

Sumber : Surabaya Dalam Angka Tahun 1996-1999

Dilihat tabel 4 diketahui bahwa sebelum di berlakukannya UUNo.22 tahun 1999 realisasi PAD Pemkot Surabaya antara tahun 1996-1999 tidak terjadi peningkatan yang signifikan, bahkan pada tahun 1998 terjadi penurunan dari Rp.142.238.941 milyar pada tahun 1997 menurun menjadi Rp.122.055.376 milyar pada tahun 1998. Tapi pada tahun 1999 terjadi peningkatan lagi menjadi Rp.138.648.846 milyar, hal ini disebabkan karena pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah agar segera bisa keluar dari krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Tabel 5
Proporsi Sumber-sumber PAD Pemkot Surabaya Sebelum diberlakukannya UU no.22 Th.1999 terhadap total PAD

No	Uraian	1996 (%)	1997 (%)	1998 (%)	1999 (%)
1.	Pajak daerah	43,25	43,92	57,20	55,63
2.	Restribusi daerah	48,28	48,71	35,73	33,46
3.	Bag.Laba usaha daerah	3,41	3,30	2,03	5,71
4.	Penerimaan Dinas	2,07	1,82	1,89	-
5.	Lain-lain pendapatan	2,99	2,23	3,15	5,21

Sumber : Buku APBD Kota Surabaya Th 1996-1999 disusun dan diolah kembali

Tabel 6
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemkot Surabaya Th 2001-2004
(Dalam Ribu Rupiah)

No	Uraian	2001	2002	2003	2004
1.	Pajak daerah	116.042.921	151.482.936	200.141.171	237.190.535
2.	Restribusi daerah	76.056.671	96.580.002	115.900.028	135.137.937
3.	Bag. Laba usaha daerah	6.022.087	11.392.404	12.619.243	14.253.961
4.	Lain-lain pendapatan	9.871.646	18.407.826	19.649.571	30.778.518
Total		207.993.326	277.863.171	348.310.013	417.360.952

Sumber : APBD Tahun 2001-2004

Dilihat dari tabel 6 diketahui bahwa setelah diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 realisasi PAD Pemkot Surabaya antara tahun 2001-2004 terjadi peningkatan yang cukup tajam dan juga mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya. Peningkatan PAD ini tidak lepas dari usaha Pemkot Surabaya dalam otonomi di bidang keuangan dalam membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahannya dengan biaya dan atas beban APBD sendiri.

Tabel 7
Proporsi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemkot Surabaya setelah
diberlakukannya UU no.32 Th.2004 terhadap total PAD
Tahun 2001-2004

No	Uraian	2001 (%)	2002 (%)	2003 (%)	2004 (%)
1.	Pajak daerah	55,79	54,52	57,46	56,83
2.	Restribusi daerah	36,57	34,76	33,27	32,38
3.	Bag.Laba usaha daerah	02,89	04,10	03,62	03,42
4.	Lain-lain pendapatan	04,75	06,62	05,64	07,37

Sumber : Buku APBD Kota Surabaya Th 2001-2004 disusun dan diolah kembali

d) Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dampak (out come) yang diharapkan dari berbagai kebijakan Kota Surabaya dalam peningkatan PAD tidak lain adalah segenap sumber-sumber PAD mampu mencapai hasil yang maksimal sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan kebijakan. Kebijakan

peningkatan PAD secara nyata dapat dilihat dari target dan realisasi yang telah ditetapkan dan dicapai dari tahun ke tahun.

Secara pokok sumber-sumber penerimaan PAD di Kota Surabaya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan. Penentuan target pemungutan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh dinas-dinas atau unit pengelolanya berdasarkan potensi dan pengalaman perkiraan penerimaan tahun sebelumnya. Untuk itu berikut data mengenai **target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Surabaya** menurut sumber penerimaannya selama kurun waktu **2001-2004** yang ditunjukkan tabel 8.

Tabel 8
Target dan realisasi PAD Kota Surabaya Th 2001-2004 (Dalam Ribu Rupiah)

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Tahun 2001			
	a. Pajak daerah	89.416.500	116.042.921	129,78
	b. Retribusi daerah	71.062.916	76.056.671	107,03
	c. Laba perusahaan daerah	13.661.026	6.022.087	44,08
	d. Lain-lain pendapatan	8.008.037	9.871.646	123,27
	Jumlah	182.148.479	207.993.326	114,19
2.	Tahun 2002			
	a. Pajak daerah	139.150.000	151.482.936	108,86
	b. Retribusi daerah	85.901.130	96.580.002	112,43
	c. Laba perusahaan daerah	11.392.236	11.392.404	100,00
	d. Lain-lain pendapatan	9.205.505	18.407.826	199,97
	Jumlah	245.648.871	277.863.171	113,11
3.	Tahun 2003			
	a. Pajak daerah	184.399.055	200.141.171	108,54
	b. Retribusi daerah	110.891.009	115.900.028	104,52
	c. Laba perusahaan daerah	12.600.789	12.619.243	100,15
	d. Lain-lain pendapatan	14.971.905	19.649.571	131,24
	Jumlah	322.862.758	348.310.013	107,88
4.	Tahun 2004			
	a. Pajak daerah	219.764.088	237.190.535	107,93
	b. Retribusi daerah	129.746.848	135.137.937	104,16
	c. Laba perusahaan daerah	13.248.961	14.253.961	100,04
	d. Lain-lain pendapatan	24.854.612	30.778.518	123,83
	Jumlah	388.614.511	417.360.952	107,40

Sumber : Buku APBD Kota Surabaya Th 2001-2004

Dilihat dari tabel 8 diatas diketahui bahwa target dan realisasi PAD Kota Surabaya antara tahun 2001-2004 terjadi peningkatan yang cukup tajam dan juga mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pencapaian target PAD ini tidak lepas dari usaha Pemerintah Kota Surabaya dalam otonomi di bidang keuangan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya dalam usaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah kota Surabaya.

2. a) Pertumbuhan Ekonomi

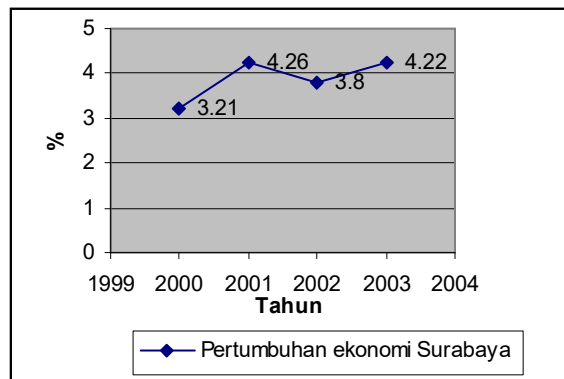
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Ka. Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik BPS Kota Surabaya, Bapak H. Moch.Sonhaji, BSc.MSc, bahwa: “salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat mewujudkan kehidupan seluruh masyarakat yang makmur dan sejahtera”. (Wawancara Tgl. 10 Juni 2005). Angka persentase pertumbuhan ekonomi sendiri dapat diperoleh dari perhitungan PDRB. Untuk melihat perbandingan Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Kota Surabaya secara global pada tahun 2002-2003 serta pendukung sektor-sektornya akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 9
Perbandingan antara Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Surabaya
Tahun 2002-2003 (%)

No	Sektor	Jatim		Surabaya	
		2002	2003	2002	2003
	UMUM	3,41	4,11	3,80	4,22
1	Pertanian	2,10	1,80	1,11	-3,40
2	Pertambangan dan penggalian	3,52	2,25	-3,25	0,38
3	Industri pengolahan	-1,68	2,81	0,66	1,77
4	Listrik, gas dan air bersih	7,30	8,97	6,58	8,66
5	Konstruksi	0,99	1,87	0,92	1,78
6	Perdagangan, hotel dan restoran	7,25	7,81	5,90	6,53
7	Pengangkutan dan komunikasi	11,16	3,84	7,28	6,08
8	Keuangan, persewaan, jasa perusahaan	4,26	3,84	5,28	2,84
9	Jasa-jasa	4,93	3,41	2,15	3,19

Sumber : Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya 2003

Dari tabel diatas diketahui bahwa perekonomian Kota Surabaya pada Tahun 2003 lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 4,22 %, lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun 2002 yang mencapai 3,80 %, bahkan lebih cepat di banding pertumbuhan di Jawa Timur sebesar 4,11%. Dari seluruh sektor pendukung PDRB Kota Surabaya diatas, sektor LGAtumbuh paling cepat yaitu sebesar 8,66%, diikuti sektor PHR sebesar 6,53% dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,08%. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berikut penulis sajikan gambarnya sbb:



Gambar 5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Th 2000-2003 (%)

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya 2003

Dari gambar di atas diketahui bahwa Kota Surabaya juga mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 sebesar 4,22%. Meskipun pertumbuhan ini lebih lambat daripada pertumbuhan tahun 2001 yang mencapai 4,26%, tetapi lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan tahun 2002 yang mencapai 3,80% dan jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 yang hanya mencapai 3,21%.

b) Investasi

Dengan diserahkannya kewenangan bidang penanaman modal ke daerah, sebenarnya merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal. Semakin banyak investasi yang di tanamkan, maka semakin besarlah nilai produksi regional yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, namun persoalannya tidak sesederhana itu, karena menarik investor bukan sekedar berhubungan dengan potensi daerah, tetapi melibatkan banyak faktor yang akan mendukung kondusifitas berusaha di suatu daerah, sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk.

Upaya yang dilakukan oleh daerah untuk menarik investor, yaitu dengan **debirokratisasi** jalur perijinan, terdapat tiga model utama langkah yang dilakukan, untuk memberikan kemudahan perijinan di daerah antara lain:

1. Membuat organisasi perangkat daerah (OPD) khusus, yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan perijinan terpadu, misalnya dinas perijinan, kantor perijinan.
2. Membentuk kantor pelayanan perijinan hingga eks-kawedanan/kecamatan.
3. Mengintensifkan OPD tertentu yang memiliki kewenangan perijinan, untuk mengeluarkan ijin-ijin tertentu, misal Dinas Industri dan Perdagangan untuk ijin usaha, Dinas Perhubungan untuk ijin trayek dll.

Persetujuan penanaman modal asing (PMA) atau investasi yang masuk ke Jawa Timur sampai semester pertama tahun ini mengalami pertumbuhan signifikan. Untuk semester pertama tahun ini tercatat 26 proyek PMA di Badan Penanaman modal (BPM) Jatim dengan nilai USD 123,8 juta, sementara periode yang sama tahun lalu jumlah proyek PMA 27 dengan nilai USD 14 juta. Naiknya nilai investasi ini didukung pertumbuhan sektor industri dan pembangunan infrastruktur yang lebih gencar dilakukan tahun ini. Investor asing yang saat ini dinilai masih cukup loyal untuk melakukan investasi di Jatim antara lain Korea Selatan dengan 10 proyek senilai USD 21,518 juta, sedangkan negara kedua adalah Taiwan yang memiliki tiga proyek dengan nilai sebesar USD 13,654 juta. Selain itu juga ada RRC dengan tiga proyek dengan nilai investasi sebesar USD 9,677 juta. Sementara dari segi usaha selain dari perdagangan, juga ada proyek bidang industri logam, proyek industri makanan, jasa, dan agro industri. Sementara dengan proyek migas yang saat ini juga sedang dibangun di Jatim, tidak termasuk dalam investasi BPM. Untuk penanaman modal dalam negeri tercatat ada tujuh proyek sampai semester pertama dengan nilai Rp.610,3 miliar. (Jawa Pos, Sabtu Tgl.16 Juli 2005)

Tantangan bagi Daerah dalam pengelolaan investasi (menarik investor), tahun-tahun mendatang terletak pada beberapa poin.

1. Daerah harus mulai memikirkan langkah-langkah advokasi kebijakan tentang desentralisasi ijin PMA.
2. Perlunya pembangunan jaringan kerjasama Daerah dalam penanganan masalah investasi. Tujuannya agar terdapat kesamaan dan kemudahan perlakuan investor, sehingga terdapat kenyamanan berinvestasi di seluruh wilayah.
3. Seyogyanya model pelayanan perijinan (termasuk ijin yang berkaitan dengan investasi), tidak hanya berhenti di “satu atap” dalam arti satu loket, tetapi “satu atap” dalam kewenangan pemberian ijin.

Selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya harus dapat juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi, dimana pertumbuhan investasi tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional, yang nantinya juga secara tidak langsung akan dapat membantu meningkatkan

PAD dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdampak pada peningkatan PAD di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya.
2. Secara umum dalam pajak daerah upaya-upaya peningkatan PAD masih mengacu pada aturan-aturan perpajakan yang telah ada.
3. Masih ada peluang yang memungkinkan untuk mengembangkan pajak baru atau mencari terobosan yang signifikan langkah-langkah selain intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan PAD dari pajak daerah.
4. Meningkatkan wilayah jangkauan pajak, agar dapat menjangkau mereka yang menghindari pajak, menggali sumber-sumber pajak baru, pungutan serta meningkatkan penggunaan aset daerah sehingga dapat menggali sumber pendapatan baru dari penggunaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.
2. Jadi Sejak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 revisi UU No. 32 tahun 2004 telah terjadi peningkatan jumlah investasi sehingga hal ini mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi regional di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran kepada Pemerintah daerah Kota Surabaya antara lain:

1. Pemerintah daerah harus tetap berusaha untuk menekankan peningkatan komponen PAD dibandingkan komponen lainnya sehingga diharapkan dapat memperkuat kemandirian pemerintah daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
2. Kota Surabaya diharapkan memiliki upaya-upaya tertentu untuk menarik masuknya investasi ke daerah serta memberikan kesempatan yang adil kepada para pelaku ekonomi yang ada dalam setiap kegiatan bisnis. Keadilan bukan suatu kesamaan, tetapi kesempatan yang diberikan kepada setiap pelaku ekonomi disesuaikan dengan

kemampuannya agar semua pihak dapat berperan dalam kegiatan ekonomi sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi regional dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- APBD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 1996, 1997, 1998 dan 1999
- APBD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004
- Biro Pusat Statistik, (2003). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya*. Indikator Ekonomi. Jakarta.
- Bonaventura, Ngw (2004). *Kajian tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Income Daerah Guna Meningkatkan PAD*. Jurnal penelitian Vol. 14 No.21 Agustus 2004 : 281-244
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cetakan pertama Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ichsan, Moch., 1997. *Administrasi Keuangan Daerah Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. PT Danar Wijaya, Brawijaya.
- Idris HP, 2003. *Implementasi Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kab. Pasir*. Brawijaya University, Malang.
- Kantor Statistik Kotamadya Surabaya, 1996-1999. *Surabaya Dalam Angka*, Surabaya
- Kantor Statistik Kotamadya Surabaya, 2000-2003. *Surabaya Dalam Angka*, Surabaya
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, 1984. *Analisa Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Surabaya Dalam Angka, (2003). *Keuangan Dan Harga-harga/Finance And Prices*. Bagian Keuangan Kota Surabaya.
- UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah revisi UU No.22 Tahun 1999

- UU RI No.33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* revisi UU No.25 Tahun 1999
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- UU No.25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*
- Jawa Pos, Terbit hari Sabtu Tgl.16 Juli 2005
- Buku Himpunan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya